

**Integrasi Pengelolaan Konten Digital dan Pembinaan Literasi
Digital oleh Humas BBPPMP sebagai Upaya Penguatan
Reputasi Lembaga**

*Integration of Digital Content Management and Digital Literacy
Development by BBPPMP Public Relations as an Effort to
Strengthen Institutional Reputation*

Najwa Shofia Ramdhani¹
Abung Supama Wijaya²
Komunikasi Digital dan Media
IPB University
Jl. Kumbang No.14, Kota Bogor 16151
najwasshofia@apps.ipb.ac.id¹ abungsupama@apps.ipb.ac.id²

Dikirim: 11 Deseember 2025, Direvisi: 12 Desember 2025,
Diterima:15 Desember 2025, Terbit: 17 Desember 2025. Sitasi:
Lubis, Nabila S, dkk (2025), Integrasi Pengelolaan Konten Digital
dan Pembinaan Literasi Digital oleh Humas BBPPMP sebagai Upaya
Penguatan Reputasi Lembaga . Promedia: Public Relation dan Media
Komunikasi, 11 (2), 430-443.

Abstract

The transformation of public communication in the digital era requires government public relations to adapt by managing communication that is participatory and context-sensitive. This study aims to analyze the integration of digital content management and digital literacy development conducted by the Public Relations unit of the Center for Development and Implementation of Agricultural Modernization (BBPPMP) in strengthening institutional reputation. This research employs a qualitative case study approach using in-depth interviews with BBPPMP public relations staff, village officials of Sukaresmi, and Posluhdes representatives, complemented by participatory observation during the literacy development program. The findings indicate that integration is achieved through direct assistance in managing village information, the implementation of two-way communication, and the design of data-informed

communication strategies aligned with local social conditions. The contextual application of Strategic Digital Public Relations (SDPR) fosters collaborative relationships between institutions and communities and contributes to strengthening community-based institutional reputation.

Keywords: *Digital Communication, Digital Literacy, Government Public Relations, Institutional Reputation, Strategic Digital Public Relations*

Abstraksi

Perubahan pola komunikasi publik di era digital menuntut humas pemerintah beradaptasi dalam mengelola komunikasi yang partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi pengelolaan konten digital dan pembinaan literasi digital oleh Humas Balai Besar Pengembangan dan Pelaksanaan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) dalam upaya memperkuat reputasi lembaga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dengan staf humas BBPPMP, perangkat Desa Sukaresmi, dan pengurus Posluhdes, serta observasi partisipatif selama pelaksanaan program pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dilakukan melalui pendampingan langsung pengelolaan informasi desa, penerapan komunikasi dua arah, serta perancangan strategi komunikasi berbasis data lapangan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penerapan *Strategic Digital Public Relations* (SDPR) secara kontekstual mendorong terbentuknya relasi kolaboratif antara lembaga dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan dan reputasi lembaga berbasis komunitas.

Kata Kunci: *Humas Pemerintah, Komunikasi Digital, Literasi Digital, Strategic Digital Public Relations, Reputasi Lembaga*

I. PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital telah menggeser pola komunikasi lembaga pemerintah secara fundamental. Era keterbukaan informasi menuntut lembaga publik menyampaikan pesan secara cepat, transparan, dan interaktif. Masyarakat kini berperan aktif membentuk opini publik serta menilai kredibilitas lembaga melalui ruang digital. Komunikasi publik karenanya tidak lagi sekadar penyampaian informasi, tetapi menjadi strategi utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi institusi. (Susanti et al., 2023) menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik pemerintah sangat ditentukan oleh konsistensi pesan dan keterlibatan publik dalam ruang digital.

Transformasi ini mengubah peran humas pemerintah dari penyampai informasi menjadi pengelola komunikasi strategis berbasis digital. (Evitha et al., 2023) menjelaskan bahwa efektivitas *digital communication management* bergantung pada kemampuan humas merancang pesan dan menjaga keterlibatan publik. (Wulandari et al., 2025) menambahkan bahwa praktik *Digital Public Relations* (DPR) menuntut integrasi antara pengelolaan konten, literasi digital, dan nilai publik sebagai dasar pembentukan reputasi lembaga. (Afrilia et al., 2023) juga menekankan pentingnya kompetensi digital aparatur humas agar komunikasi publik berlangsung kredibel dan partisipatif.

Kerangka *Strategic Digital Public Relations* (SDPR) dari (Wachid et al., 2024) menjadi pijakan utama dalam penelitian ini. SDPR menyoroti tiga pilar penting humas modern: transformasi digital, keterlibatan publik dua arah, dan pengambilan keputusan berbasis kolaborasi. Teori literasi digital (UNESCO 2025) turut memperkuat analisis dengan menekankan kemampuan individu dan komunitas dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks lembaga teknis pemerintah, peran humas mencakup publikasi kelembagaan sekaligus pemberdayaan

masyarakat melalui literasi digital. (Hidayat & Imran, 2025) menegaskan bahwa penguatan literasi digital harus disertai pembinaan etika bermedia agar komunikasi publik berjalan produktif dan berkelanjutan. Balai Besar Pengembangan dan Pelaksanaan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) menjalankan fungsi ini melalui publikasi digital serta pendampingan masyarakat desa binaan. Humas BBPPMP tidak hanya memproduksi konten kelembagaan, tetapi juga membina perangkat desa agar mampu mengelola komunikasi publik secara mandiri.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti komunikasi digital lembaga pemerintah. (Fardiah et al., 2024) menemukan bahwa media digital memperkuat transparansi dan partisipasi publik, sedangkan (Evitha et al., 2023) menekankan pentingnya koordinasi lintas unit dalam menjaga konsistensi pesan digital. (Wulandari et al., 2025) menunjukkan bahwa sinergi antara manajemen konten dan literasi digital berperan penting dalam membangun reputasi lembaga. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi antara pengelolaan konten digital dan pembinaan literasi digital diterapkan oleh humas pemerintah, khususnya pada lembaga teknis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integrasi kedua aspek tersebut oleh Humas Balai Besar Pengembangan dan Pelaksanaan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) sebagai model komunikasi publik yang berorientasi pada reputasi lembaga. Pendekatan ini menempatkan humas tidak hanya sebagai komunikator kelembagaan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran digital bagi masyarakat desa binaan. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: bagaimana Humas BBPPMP mengintegrasikan pengelolaan konten digital dan pembinaan literasi digital untuk upaya memperkuat reputasi lembaga. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan strategi integratif Humas BBPPMP dalam mengelola komunikasi digital berbasis partisipasi

dan data guna upaya memperkuat reputasi kelembagaan di era digital.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup beberapa bagian seperti dijelaskan di bawah ini:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan holistik mengenai bagaimana Humas Balai Besar Pengembangan dan Pelaksanaan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) mengintegrasikan pengelolaan konten digital dan pembinaan literasi digital dalam upaya memperkuat reputasi lembaga. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu konteks kelembagaan dan wilayah binaan tertentu, sehingga memungkinkan peneliti menggali secara rinci proses komunikasi, strategi humas, serta dinamika relasi antara lembaga dan masyarakat. Pendekatan kualitatif tidak bertujuan mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan menafsirkan makna, praktik, dan mekanisme komunikasi digital yang berkembang secara alami di lapangan.

Penelitian dilaksanakan selama masa magang akademik pada 8 September hingga 18 November 2025. Lokasi penelitian meliputi BBPPMP Kota Bogor sebagai pusat aktivitas kelembagaan humas, serta Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor sebagai lokasi pelaksanaan program pembinaan literasi digital. Posisi peneliti sebagai peserta magang dimanfaatkan untuk memperoleh akses langsung terhadap proses komunikasi humas, namun tetap dijaga dengan pendekatan reflektif agar tidak mengaburkan objektivitas analisis.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan memungkinkan triangulasi data.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu integrasi pengelolaan konten digital,

pembinaan literasi digital, serta peran humas dalam membangun reputasi lembaga. Wawancara dilaksanakan secara langsung selama Oktober–November 2025. Informan penelitian terdiri atas:

- Staf Humas BBPPMP, yang terlibat dalam perencanaan, produksi, dan pelaksanaan komunikasi digital lembaga.
- Perangkat Desa Sukaresmi, yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan literasi digital.
- Perwakilan Posluhdes, yang mendampingi masyarakat desa selama proses pembinaan berlangsung.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam program komunikasi dan pembinaan digital.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif selama masa magang akademik, baik di lingkungan kantor BBPPMP maupun di lokasi kegiatan lapangan di Desa Sukaresmi. Observasi mencakup proses koordinasi internal humas, pelaksanaan kegiatan pembinaan literasi digital, serta interaksi komunikasi antara humas, perangkat desa, dan masyarakat. Data observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi visual sebagai pendukung hasil wawancara.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik komunikasi digital, humas pemerintah, literasi digital, dan teori Strategic Digital Public Relations (SDPR). Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik sekaligus alat bantu analisis dalam menafsirkan temuan empiris.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data, yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk menggambarkan pola komunikasi, bentuk integrasi program, serta mekanisme kolaborasi antara humas dan mitra desa.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu proses interpretasi temuan penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber melalui teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Humas BBPPMP dalam Pengelolaan Komunikasi Digital

Pelaksanaan program pembinaan di Desa Sukaresmi memperlihatkan penerapan prinsip *Strategic Digital Public Relations* (SDPR) oleh Humas Balai Besar Pengembangan dan Pelaksanaan Modernisasi Pertanian (BBPPMP). Dalam paradigma ini, fungsi humas tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi kelembagaan, tetapi sebagai aktor strategis yang mengelola komunikasi berbasis data, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun hubungan dialogis dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan staf humas, perangkat desa, dan pengurus Posluhdes menunjukkan bahwa peran humas BBPPMP tidak terbatas pada tugas administratif. Fungsi utama diarahkan pada penguatan kapasitas komunikasi publik masyarakat desa melalui pendampingan pengelolaan informasi dan pemanfaatan kanal digital secara terencana. Hal ini tercermin dari pandangan Kepala Desa Sukaresmi yang menilai bahwa keterlibatan humas BBPPMP melampaui fungsi dokumentasi kelembagaan, sebagaimana disampaikan berikut ini:

“Humas BBPPMP bukan hanya datang untuk dokumentasi kegiatan, tapi ikut mendampingi kami memahami bagaimana informasi desa bisa disampaikan dengan lebih rapi dan jelas lewat media digital.” (I.I, 22 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan komunikasi digital terjadi melalui proses pendampingan langsung yang mendorong perubahan cara desa

mengelola informasi publik. Aktivitas publikasi yang dilakukan tidak berhenti pada produksi konten, tetapi mencakup penyusunan narasi kegiatan, pendokumentasian hasil pelatihan, serta pengelolaan arus informasi desa agar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa BBPPMP memposisikan humas sebagai fasilitator komunikasi digital antara lembaga dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pilar pertama SDPR, yaitu transformasi digital, yang menekankan integrasi teknologi dalam sistem komunikasi pemerintah. Transformasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi membentuk pola relasi komunikasi yang lebih kolaboratif dan partisipatif (Nugraha et al., 2020) Implementasi strategi digital oleh BBPPMP menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi kelembagaan di tingkat lokal.

B. Program Pembinaan Literasi Digital Masyarakat Desa Sukaresmi

Program pembinaan literasi digital yang dilaksanakan BBPPMP merepresentasikan penerapan pendekatan partisipatif dalam komunikasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini melibatkan perangkat desa, pengurus Posluhdes, serta pelaku UMKM sebagai peserta aktif. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi potensi lokal.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta diskusi kelompok yang berfokus pada pembuatan konten sederhana, penggunaan aplikasi komunikasi daring, dan pemahaman etika bermedia. Pendekatan ini mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dialog dan pertukaran pengalaman. Kepala Desa Sukaresmi menegaskan bahwa pembinaan tersebut berpengaruh pada perubahan cara pandang desa dalam mengelola informasi publik, sebagaimana disampaikan berikut:

“Sekarang kami lebih berhati-hati dan terencana saat menyampaikan informasi. Kami paham bahwa informasi desa

perlu dikemas supaya mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir.”(I.I, 22 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak dimaknai semata sebagai keterampilan teknis, melainkan sebagai kesadaran komunikasi publik. Hasil observasi juga memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Ketua Posludhes menilai bahwa proses pembinaan mendorong dialog dua arah antara fasilitator dan masyarakat desa, sebagaimana diungkapkan berikut:

“Masyarakat tidak hanya mendengarkan, tapi juga banyak bertanya dan berbagi pengalaman. Diskusi berjalan dua arah karena materi memang dekat dengan kebutuhan mereka.” (A.P, 22 Oktober 2025)

Temuan ini sejalan dengan pilar ketiga SDPR, yakni keterlibatan dua arah (*two-way communication*), yang menempatkan publik sebagai mitra komunikasi. Sejalan dengan (Agustin et al., 2024), pembinaan literasi digital melalui pendekatan partisipatif terbukti memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menyebarkan informasi publik secara lebih efektif, sekaligus membangun relasi kolaboratif antara lembaga dan komunitas desa.

C. Praktik Humas Berbasis Data dalam Perancangan Program

Strategi komunikasi BBPPMP ditopang oleh penerapan praktik berbasis data (*data-driven public relations*) pada setiap tahap pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta evaluasi kegiatan untuk memahami kebutuhan sosial dan pola komunikasi masyarakat desa. Praktik tersebut ditegaskan oleh staf Humas BBPPMP yang menyampaikan bahwa perancangan program komunikasi selalu didasarkan pada kondisi empiris di lapangan, sebagai berikut:

“Kami mengamati kebutuhan desa, tingkat literasi digital masyarakat, serta hambatan yang ada. Data dari observasi dan

diskusi menjadi dasar utama penyusunan strategi komunikasi.” (H.N.P, 8 November 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa praktik berbasis data dalam konteks penelitian ini bersifat kontekstual dan situasional, bukan statistik semata. Data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis agar pesan yang disampaikan relevan dengan karakteristik publik. Pendekatan ini sejalan dengan pilar kedua SDPR yang menekankan pentingnya penggunaan data empiris dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi (Noviati et al., 2025)

Data yang dihimpun juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas program dan memastikan kegiatan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara tujuan pembinaan, respons peserta, dan hasil yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, komunikasi kelembagaan BBPPMP berjalan seiring dengan realitas sosial masyarakat dan menghasilkan strategi yang adaptif serta berbasis bukti.

D. Tantangan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Digital

Implementasi Implementasi prinsip SDPR di BBPPMP menghadapi sejumlah kendala struktural dan sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama berasal dari rendahnya literasi digital masyarakat desa, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta perbedaan tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima pola komunikasi digital. Ketua Posluhdes menyoroti bahwa tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan sosial masyarakat desa, sebagaimana disampaikan berikut:

“Sebagian masyarakat masih ragu menggunakan media digital karena takut salah. Jadi pendekatannya harus pelan dan tidak bisa dipaksakan.” (A.P, 22 Oktober 2025)

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sosial dan budaya masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, BBPPMP mengadopsi pendekatan hibrida dengan mengombinasikan komunikasi digital dan tatap muka

melalui diskusi langsung dan pendampingan lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Kohar et al., 2025) yang menyatakan bahwa komunikasi digital pemerintah perlu disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat agar pesan dapat diterima secara efektif.

E. Esensi Peran Humas BBPPMP terhadap Penguatan Reputasi Lembaga

Penerapan prinsip SDPR oleh BBPPMP berkontribusi terhadap penguatan citra dan reputasi lembaga di tingkat lokal. Integrasi antara pengelolaan komunikasi digital, pembinaan literasi digital, serta praktik berbasis data menjadikan humas berperan sebagai pengelola komunikasi strategis yang menjembatani kepentingan lembaga dan masyarakat. Pandangan tersebut tercermin dari persepsi Kepala Desa Sukaresmi terhadap kehadiran BBPPMP, sebagai berikut:

“BBPPMP dipandang sebagai lembaga yang mau turun langsung dan mendampingi, bukan hanya menjalankan program lalu selesai.” (I.I., 22 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reputasi lembaga terbentuk melalui keterlibatan nyata dan hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat. Model komunikasi partisipatif yang diterapkan BBPPMP memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi program di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan (Wardhani et al., 2025) yang menegaskan bahwa inovasi public relations di era digital berperan penting dalam membangun reputasi organisasi publik melalui transparansi dan interaksi dua arah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Humas BBPPMP menerapkan prinsip *Strategic Digital Public Relations* (SDPR) melalui transformasi digital, praktik berbasis data, dan keterlibatan dua arah dengan masyarakat. Penerapan ini diwujudkan melalui pendampingan langsung dan komunikasi dialogis yang memperkuat kepercayaan serta legitimasi lembaga.

2. Program pembinaan literasi digital di Desa Sukaresmi menjadi bentuk komunikasi publik partisipatif yang mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola informasi publik serta memanfaatkan media digital untuk pemberdayaan lokal.
3. Integrasi pengelolaan konten digital dan pembinaan literasi digital membentuk model humas pemerintah yang adaptif dan kolaboratif, dengan orientasi pada penguatan reputasi lembaga dan keberlanjutan komunikasi digital berbasis komunitas.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain durasi penelitian yang relatif singkat serta fokus kajian yang terbatas pada satu desa binaan, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan secara luas pada lembaga pemerintah di wilayah lain.

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan dan menambahkan analisis konten digital guna memperkuat kedalaman dan validitas temuan empiris.
2. BBPPMP perlu memperkuat pendampingan pascaprogram, meningkatkan kompetensi digital aparatur humas, serta mengembangkan pedoman etika komunikasi digital berbasis komunitas.
3. Lembaga pemerintah lain dapat mereplikasi model SDPR BBPPMP dengan menyesuaikan konteks sosial dan infrastruktur lokal untuk membangun komunikasi publik yang partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, A. M., Rhizky, D. P., Putri, W. E., dan Ratnasari, E. 2023. *The Digital Competence of Government Public Relations Officer in Magelang City*. Bandung: Profesi Humas.
- Agustin, T. D., Indrawati, dan Jawasi. 2024. *Efektivitas Literasi Digital dan Informasi melalui Media Sosial Facebook Tokoh Masyarakat bagi Warga Desa Terusan*. Palembang: ITTC Indonesia.
- Evitha, Y., Saktisyahputra, S., Sari, S. N., Suprayitno, D., dan Irrianda, J. F. 2023. *Digital Communication Management Government of the Republic of Indonesia for Inclusive and Sustainable Economic Recovery in Indonesia*. Indonesia: Transdisciplinary Symposium on Business, Economics, and Communication.
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Supaat, V. E. M., dan Hadnansyah, E. 2024. *Digital Transformation through Electronic-Based Government System Performance as Public Relations Strategy*. Bandung: Profesi Humas.
- Hidayat, A., Salim, R. F., Ilyas, dan Suherman, F. 2024. *Program Literasi Digital dan Etika Media Sosial bagi Pelajar*. Bandung: Jurnal Pengabdian Tri Bhakti.
- Kohar, A., Nurhaliza, E., Rahma, S. G., Puspitasari, Y., dan Ferdiana, R. 2025. *Strategi Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pemerintah*. Indonesia: Saber: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Noviati, Y., Khoniario, A. F., Syaputri, K. C., dan Misidawati, D. N. 2025. *Implementasi Data-Driven Decision Making dalam Strategi Public Relation: Studi Kasus pada Kampanye Media Sosial E-Commerce TikTok Shop*. Pekalongan: Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Erdinaya, L. K., dan Komariah, K. 2020. *Komunikasi Humas Pemerintahan Kabupaten/Kota di*

- Jawa Barat melalui Media Digital Instagram*. Bandung: Jurnal Kajian Komunikasi.
- Susanti, T., Anom, E., dan Iswadi. 2023. *Optimizing Public Communication in the Digital Era: A Case Study of the Ministry of Communication and Information Technology in Indonesia*. Jakarta: CHANNEL: Jurnal Komunikasi.
- UNESCO. 2025. *What you need to know about literacy*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wachid, A., Haryanto, T., dan Pramudya, R. 2024. *Strategic Digital Public Relations: Konsep dan Implementasi pada Lembaga Publik*. Bandung: Jurnal Public Relations dan Strategi Komunikasi.
- Wardhani, S. P., Salsabila, N. R., Septia, R., Romlah, dan Wakhid, A. A. 2025. *Public Relations Innovation in the Digital Era: Building Public Organizations' Reputations Through Social Media*. Lampung: Indonesian Journal of Education and Social Studies.
- Wulandari, M. P., Wachid, I. B., Dahlia, S., Bahesa, S. B. P., dan Arista, K. G. W. S. W. 2025. *Digital Public Relations in Indonesia in the Age of AI and Big Data: Theoretical and Practical Insights from a Five-Dimensional Framework*. Malaysia: Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication.